



# RENCANA KERJA (RENJA) DPMPTSP TAHUN 2024



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Serang  
2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Isi Rencana Kerja ini merupakan rangkuman evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan kegiatan berjalan Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Penjabaran Program dan Indikasi Kegiatan yang termuat pada RENSTRA dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun mengacu pada rancangan awal RENJA, RENSTRA DPMTSP, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang di hadapi serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat

Akhirnya mudah-mudahan Rencana Kerja ini, dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Masyarakat pada umumnya.

Serang, 12 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang



**H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690424 199901 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021 6</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP .....	21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi DPMPTSP.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP.....</b>	<b>31</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMPTSP .....	32
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP.....	33

<b>BAB IV. RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN DPMPTSP</b>	<b>45</b>
4.1. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan 2024	45
<b>BAB V. P E N U T U P .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	7
2. Tabel 2.2 Belanja Daerah.....	10
3. Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan.....	10
4. Tabel 2.4 Anggaran Tahun 2022.....	16
5. Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2022.....	20
6. Tabel 2.6 Capaian Indikator DPMPSTSP 2016 dan 2021.....	21
7. Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023.....	24
8. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	34
9. Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2023.....	46

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang yaitu pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan satu Dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu Dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan Dokumen Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana DPMPSTSP adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan

mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RENJA, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang menyusun suatu Dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Kerja (RENJA-DPMPTSP) Tahun 2023. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut disusun berdasarkan visi Kabupaten Serang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang hendak diwujudkan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra DPMPTSP 2021-2026 yaitu Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa
2. Sasaran Renstra DPMPTSP 2021-2026 yaitu Meningkatnya investasi Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

13. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati Serang periode 2021-2026.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang berorientasi pada hasil.
3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di

Kabupaten Serang dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

4. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2024 disusun dalam Empat BAB.

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi DPMPTSP
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMPTSP
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026**

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2023), mengacu pada kegiatan tahun berjalan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu, dan realisasi Renstra DPMPTSP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMPTSP dan/atau realisasi APBD untuk DPMPTSP.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 yang disusun pada awal tahun 2021. Renja tahun 2022 memuat target kinerja tahun 2022 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebagai upaya mewujudkan sasaran dan tujuan utamanya kearah peningkatan pendapatan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam pelaksanaannya di dukung dengan pengalokasian anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN atau sumber dana lainnya yang terkoordinasi secara legal.

Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang mendapat Alokasi Anggaran Perubahan sebesar : 10.373.678.535 yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi : Rp 10.373.678.535,-
- b. Belanja Modal : Rp 0,-

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAI AN (%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	9.707.025.535	9.181.163.975	94,58
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	84.147.000	83.310.000	99,01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.127.000	14.788.000	97,76
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.750.000	3.750.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.750.000	3.750.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.170.000	5.150.000	99,61
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.350.000	55.872.000	99,15
<b>2</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	7.729.644.640	7.343.487.992	95,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.713.200.000	7.327.087.992	94,99
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.869.240	11.850.000	99,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.575.400	4.550.000	99,44
<b>3</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	12.400.000	12.400.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.400.000	2.400.000	100,00

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	100,00
<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	555.006.950	454.736.725	81,93
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.484.000	7.464.000	99,73
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.815.325	84.815.325	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.400.000	52.400.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.500.000	43.461.000	99,91
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.489.600	86.302.400	99,78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.318.000	180.294.000	64,32
<b>5</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1.145.060.204	1.107.730.941	96,74
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.260.000	4.260.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.992.000	195.696.000	95,47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	935.808.204	907.774.941	97,00
<b>6</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	180.766.766	179.498.317	99,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.706.260	154.438.611	99,19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.856.000	11.856.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.204.506	13.203.706	99,99
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	7.500.000	7.500.000	100,00
<b>7</b>	<b>PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.750.000	3.750.000	100,00
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3.750.000	3.750.000	100,00

<b>8</b>	<b>PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA</b>	3.750.000	3.750.000	100,00
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3.750.000	3.750.000	100,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	7.830.000	7.830.000	100,00
<b>9</b>	<b>PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7.830.000	7.830.000	100,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.830.000	7.830.000	100,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	39.525.000	39.525.000	100,00
<b>10</b>	<b>PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	39.525.000	39.525.000	100,00
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	31.200.000	31.200.000	100,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	8.325.000	8.325.000	100,00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	388.414.000	327.574.000	84,34
<b>11</b>	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	388.414.000	327.574.000	84,34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.500.000	4.500.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	257.320.000	236.460.000	91,89
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	126.594.000	86.614.000	68,42
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	223.384.000	213.897.350	95,75
<b>12</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTERGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	223.384.000	213.897.000	95,75
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	223.384.000	213.897.000	95,75
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>10.373.678.535</b>	<b>9.777.490.325</b>	<b>94,25</b>

Tabel 2.2  
Belanja Daerah

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.373.678.535,00	9.777.490.325,00	94,25
	Belanja Pegawai	7.713.200.000,00	7.327.087.992,00	94,99
	Belanja Barang dan Jasa	2.660.478.535,00	2.450.402.333,00	92,10
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>10.373.678.535,00</b>	<b>9.777.490.325,00</b>	<b>94,25</b>

Tabel 2.3  
Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2022	
			Rp	%
<b>1</b>	Retribusi Pelayanan	7.500.000,-	5.500.000,-	73,33
<b>2</b>	Kesehatan	1.000.000,-	350.000,-	35,00
<b>3</b>	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.000.000.000	9.100.202.607,-	75,84
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)			
	<b>Jumlah</b>	<b>12.008.500.000</b>	<b>9.106.052.067,-</b>	<b>75,83</b>
		,-	-	

Pada tabel diatas terlihat bahwa Target Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar 12.000.000.000,- dengan realisasi Realisasi Rp. 9.100.202.607,- atau sekitar 83,31 %. Dan pencapaiannya dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan (Izin Laik Sehat) Rp. 5.500.000,- dari target 7.500.000,- atau sekitar 73,33 %. Realisasi RetribusiRetribusi Izin Trayek angkutan Penumpang umum 350.000,-dari target 1.000.000,- atau sekitar 35,00 %

### **1. Uraian Rencana Program dan Kegiatan tahun 2022**

Program pada urusan penanaman modal tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

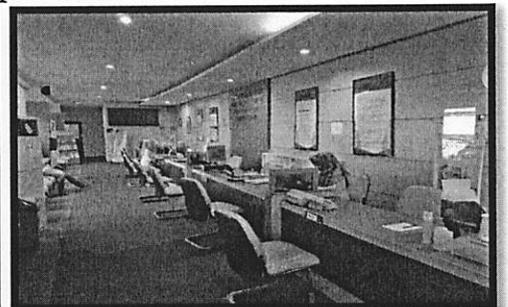
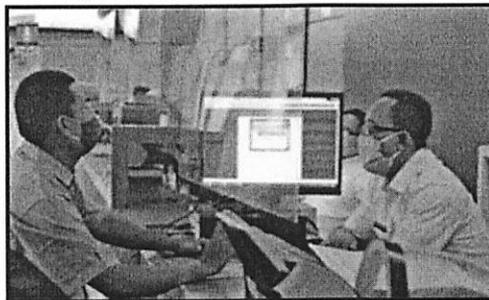
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  2. Administrasi keuangan perangkat daerah
  3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  4. Administrasi umum perangkat daerah
  5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pengembangan iklim penanaman modal
  1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
  2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
- c. Program promosi penanaman modal
  1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- d. Program pelayanan penanaman modal
  1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

- e. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
  - 1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
  - 1. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022**

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.500.000,- (100 %) . Dalam Pelaksanaannya Program di tunjukan sebagai upaya meningkatkan investor menanamkan modalnya di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp 3.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.750.000,- (100 %), dimaksudkan untuk melakukan segala bentuk fasilitasi pelayanan yang berhubungan dengan izin penanaman modal dari mulai tahap penerimaan berkas, verifikasi sampai penerbitan izin dan non izin penanaman modal. Outputnya adalah persentasi fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan dan non izin. Sampai akhir tahun 100 % .



### **Pelayanan**

- 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 3.750.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 3.750.000,- (100 %), dimaksudkan sebagai bentuk awal dalam menyusun kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal sampai dengan ke pengembangan penanaman modal output yang dihasilkan adalah 1 (satu) Dokumen.

b. Program Program Promosi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.830.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.830.000,- (100 %) . Dalam Pelaksanaannya Program di tunjukan sebagai upaya menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

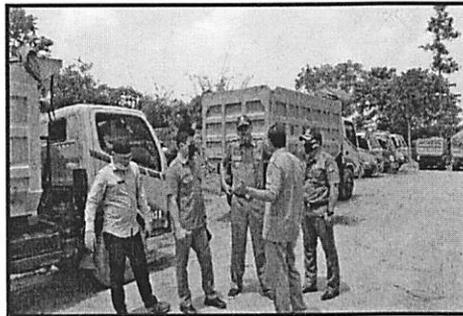
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 7.830.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.830.000,- (100 %), dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Serang baik dari ketersediaan Sumber Daya Alam maupun penawaran terhadap ketersediaan infrastruktur dan kemudahan investasi di Kabupaten Serang dengan output yang di hasilkan adalah 1 (satu) kegiatan penyebaran informasi investasi.



b. Program Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran Rp. 39.525.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.525.000,- (100 %) . Dalam Pelaksanaannya Program Pelayanan Penanaman Modal ditunjukan sebagai upaya meningkatkan

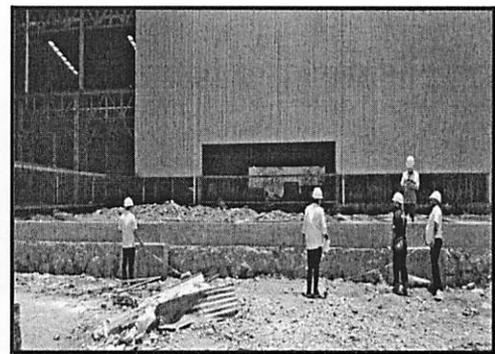
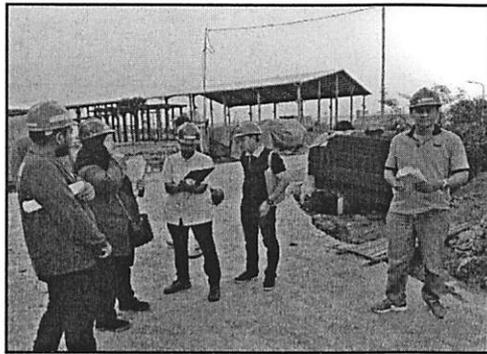
Pelayanan Perizinan Tertentu dan non Perizinan di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pagu anggaran Rp. 31.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 31.200.000,- (100 %), dimaksudkan untuk memberikan segala bentuk pelayanan Perizinan Tertentu dan non Perizinan dalam bentuk menerima berkas permohonan perizinan , konsultasi perizinan, layanan pengaduan dengan output yang di hasilkan adalah persentase pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2022 sebesar 100%.



- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK), dengan pagu anggaran Rp. 388.414.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 327.574.000,- (84,34%) . Dalam Pelaksanaannya Program Pelaksanaan Pengendalian ditunjukkan sebagai upaya meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DAK), pagu anggaran Rp. 388.414.000,- realisasi anggaran 388.414.000,- (84,34%) dimaksudkan sebagai bentuk kegiatan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Output yang dihasilkan adalah pengendalian sudah dilaksanakan 100 %.



d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran Rp. 223.384.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 213.897.350,- (95,75%) . Dalam Pelaksanaannya Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal ditunjukkan sebagai upaya meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

- 1) Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 213.897.350,- realisasi anggaran Rp. Rp. 213.897.350,- (95,75%) dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas/ mutu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dipandang perlu guna memudahkan dalam pengadministrasian pengelolaan perizinan dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat

memperoleh pelayanan perizinan secara online. Output yang dihasilkan adalah Aplikasi sistem informasi yang sudah dimiliki DPMPTSP pada tahun 2022 yaitu updating website 100%

Demikian secara keseluruhan belanja pelaksanaan urusan Penanaman Modal yang direalisasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Serang tahun anggaran 2022 dengan kinerja yang dihasilkan antara lain :

1. Tersusunnya Perubahan Renstra 2021-2026 dan Renja DPMPTSP Tahun 2023
2. Terselenggaranya Updating Perizinan Online
3. Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Perizinan Tahun 2022
4. Terselenggaranya pameran investasi baik dalam maupun luar daerah
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

### 3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)

Program dan kegiatan tahun 2023 merupakan implementasi dari RPJMD tahun Ketiga yang mana penyusunannya sudah memperhatikan undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini anggaran 2023.

Tabel 2.4  
Anggaran 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,017,336
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	9,560,400

			RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,636,722
			Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,609,400,000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,200,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triulanan/Semesteran SKPD	4,200,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25,900,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,661,800
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,213,400
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117,049,700
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89,016,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49,500,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	145,923,500
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339,494,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55,555,368

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221,912,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	846,276,436
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urgan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435,663,480
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,270,600
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,032,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,463,900
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	32,622,000
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	32,425,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	104,819,400
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Sat Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Penyediaan Layanan Konsultai dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	25,000,000

		Kabupaten/Kota		
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24,500,000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	316,811,800
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	184,760,000
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bersaha Terintegrasi secara Elektronik	403,430,200
	<b>Jumlah</b>			<b>11,370,315,042</b>

Untuk menentukan target kegiatan disusunlah Perjanjian Kinerja 2023 dengan tujuan untuk mewujudkan target kinerja tahun dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab DPMPSTSP. Berikut Tabel PK Tahun 2023.

Tabel 2.5  
Tabel Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	<b>Meningkatnya investasi dan perekonomian masyarakat</b>	Nilai Investasi		
		PMA	2,62	Rp (T)
		PMDN	3,15	Rp (T)
		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100	%
		Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%
		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100	%
		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100	%
		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100	%
2		<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Nilai Sakip	B

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dari hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program-program tahun 2021-2026 tersebut, capaian indikator kinerja DPMPTSP sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra						Realisasi Renstra					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Investasi													
	<i>PMA</i>	Rp Trilyun	2.47	2.54	2.62	2.70	2.78	2.86	3.29	4.81				
	<i>PMDN</i>	Rp Trilyun	2.97	3.06	3.15	3.25	3.34	3.43	2.44	1.90				
2	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
3	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	100				

6	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
7	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dalam RPJMD yaitu Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal yang dapat di jabarkan sebagai berikut sebagai :

1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan Pengembangan Promosi yang Berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan membangun Mal Pelayanan Publik;
3. Peningkatan pengembangan sistem data informasi terupdate dan terintegrasi

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (2024)**

Review terhadap rancangan Renja awal tahun 2024 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang berjumlah 9 program meliputi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berikut Review Program dan kegiatan sebagai penunjang dalam pencapaian kinerja di Tahun 2024 beserta analisis kebutuhannya sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Rancangan Awal Renja Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Targ et Capaian Kine rja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Kab Serang	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	200,000,000
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Dokumen evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Serang	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RUPM	Kab Serang	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000

		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Kab Serang	1 peta	100,000,000	1 peta	200,000,000
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab Serang	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanakannya promosi penanaman modal	Kab Serang	3 kali	250,000,000	3 kali	250,000,000
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Serang	100%	400,000,000	100%	600,000,000
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Terpantaunya Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab Serang	30 pelaku usaha	100,000,000	30 pelaku usaha	100,000,000

		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab Serang	25 pengaduan terselesaikan	150,000,000	25 pengaduan terselesaikan	200,000,000
		koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Terkoordinasikannya Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Kab Serang	10 pelaku usaha	50,000,000	10 pelaku usaha	100,000,000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	100 pelaku usaha	150,000,000	100 pelaku usaha	150,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggarakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	3 keg	150,000,000	3 keg	200,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	terkoordinasikannya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	150 Pelaku usaha	200,000,000	150 Pelaku usaha	250,000,000

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terselenggarakannya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Serang	2 aplikasi, 1 updating sistem	1,000,000,000	2 aplikasi, 1 updating sistem	1,500,000,000
<b>URUSAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPMPPTS P	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Melebihi Pagu Validasi	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	DPMPPTS P	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	DPMPPTS P	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DPMPPTS P	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTS P	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggarakannya Penyediaan A Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTS P	12 bulan	8,665,378,659	12 bulan	8,665,378,659

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggarakannya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTS P	4 Keg	70,000,000	4 Keg	70,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTS P	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPMPTS P	72 set	40,000,000	72 set	30,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTS P	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTS P	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTS P	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTS P	12 bulan	160,000,000	12 bulan	164,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTS P	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPMPTS P	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasikannya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPMPTS P	12 bulan	600,000,000	12 bulan	600,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPMPTS P	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTS P	12 bulan	300,000,000	12 bulan	300,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPMPTS P	12 bulan	800,000,000	12 bulan	900,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTS P	27 unit	300,000,000	27 unit	470,000,000
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMPTS P	3 Jenis	50,000,000	3 Jenis	50,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanakannya Pemeeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMPTS P	12 bulan	100,000,000	12 bulan	176,000,000

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTS P	4 Jenis	50,000,000	4 Jenis	50,000,000
				<b>Jumlah</b>			<b>15,165,378,659</b>		<b>16,665,378,659</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada usulan baik dari Reses Dewan Atau pun LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya terkait dengan usulan Program dan Kegiatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2020-2024, Visi BKPM tahun 2020-2024 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II yaitu: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden”**

#### **Misi BKPM RI**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

#### **Tujuan**

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

#### **Sasaran Strategis**

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

#### **Arah Kebijakan**

1. Peningkatan inovasi penanaman modal dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang merupakan DPMPTSP yang baru berdiri berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang. dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

DPMPTSP dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebagai unsur pembantu Bupati telah menetapkan Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Serang, maka telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

#### Tujuan

- a. Meningkatkan Investasi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan publik.
- c. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur.

- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang.

### Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
- b. Meningkatkan pencapaian hasil penyelenggaraan pelayanan.
- c. Meningkatkan komunikasi, sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur dengan pengetahuan pelayanan.
- e. Meningkatnya investasi di Kabupaten Serang.

### **3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP**

Berikut ini adalah penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024.

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2025

Urusan pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Serang	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kab Serang	10 Kegiatan usaha	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Serang	1 Dokumen	350,000,000	APBD		1 Dokumen	350,000,000
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab Serang	1 peta	150,000,000	APBD		1 peta	150,000,000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Serang	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	6,000,000
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanakannya promosi penanaman modal	Kab Serang	10 kali	250,000,000	APBD		10 kali	250,000,000

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Serang	3,750 Pelaku usaha	200,000,000	APBD		4,300 Pelaku usaha	250,000,000
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen	Kab Serang	50 Kegiatan usaha	50,000,000	APBD		50 Kegiatan usaha	50,000,000
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Serang	75 orang	70,000,000	APBD		100 orang	100,000,000

				koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Serang	2 pelaku usaha	50,000,000			2 pelaku usaha	50,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	50 Kegiatan Usaha	50,000,000	APBD		50 pelaku usaha	50,000,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	272 Pelaku Usaha	70,000,000	APBD		272 Pelaku Usaha	100,000,000

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab Serang	100 Kegiatan Usaha	150,000,000	APBD		100 Kegiatan Usaha	150,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab Serang	6,250 dokumen	5,680,000,000	APBD	Pembangunan infrastruktur jaringan MPP	6,550 dokumen	2,500,000,000
	URUSAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPSTP	2 Dokumen	75,000,000	APBD		2 Dokumen	75,000,000

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Melebihi Pagu Validasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	2 Dokumen	20,000,000	APBD		2 Dokumen	20,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	2 Dokumen	20,000,000	APBD		2 Dokumen	20,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	DPMPTSP	1 Laporan	25,000,000	APBD		1 Laporan	25,000,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DPMPTSP	1 Laporan	80,000,000	APBD		1 Laporan	80,000,000

			Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DPMPTSP	43 orang/b ulan	8,300,000,000	APBD		43 orang/ bulan	8,300,000,000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	1 dokume n	50,000,000	APBD		1 dokum en	50,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	DPMPTSP	4 Laporan	20,000,000	APBD		2 Lapora n	20,000,000
			Administra si Kepegawaia n Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPTSP	72 set	400,000,000	APBD	Seraga m MPP	72 set	400,000,000

			Administra si Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	30,000,000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	500,000,000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPPTSP	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPPTSP	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	DPMPPTSP	4 Dokume n	70,000,000	APBD		4 Doku men	70,000,000
				Fasilitasi Kunjungan Tamud	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	DPMPPTSP	12 Laporan	400,000,000	APBD		12 Lapora n	400,000,000

					Tamu							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	500,000,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 Laporan	60,000,000	APBD		12 Laporan	60,000,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	850,000,000	APBD	Advetorial, Listrik 2 gedung	12 Laporan	750,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	2,200,000,000	APBD	outsourcing petugas MPP, launching MPP	12 Laporan	1,700,000,000

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	27 unit	505,000,000	APBD		27 unit	505,000,000
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	50 unit	200,000,000	APBD		50 Unit	200,000,000
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	40 unit	100,000,000	APBD		40 unit	100,000,000
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1 unit	100,000,000	APBD		1 unit	100,000,000

				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	200,000,000	APBD		1 unit	200,000,000
				JUMLAH				22,705,000,000				18,881,000,000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan 2024**

Berdasarkan Musrenbang Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang membuat Rencana Program dan Kegiatan hasil usulan melalui Forum DPMPTSP yang dilaksanakan pada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dihadiri oleh lintas DPMPTSP pihak terkait.

Adapun usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus menjadi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

#### Rencana Kerja 2024 DPMPTSP

Gaji dan Tunjangan	: Rp. 7,487,900,000,-
<u>Belanja Operasi</u>	<u>: Rp. 5,015,000,000,-</u>
Total	: Rp.12.502.900.000,-

Tabel. 4.1  
Rencana Kerja TA. 2024

Urusan pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Rencana Kerja Tahun 2024				
					Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Serang	1 Dokumen	50,000,000	APBD
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kab Serang	5 Kegiatan Usaha	50,000,000	APBD

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Serang	1 Dokumen	300,000,000	APBD
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab Serang	1 peta	50,000,000	APBD
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab Serang	1 Dokumen	25,000,000	APBD
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Serang	3 kali	150,000,000	APBD

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Serang	100%	150,000,000	APBD
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen	Kab Serang	30 pelaku usaha	50,000,000	APBD
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Kab Serang	25 pengaduan terselesaikan	50,000,000	APBD

					Perizinan				
				koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab Serang	10 pelaku usaha	50,000,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	100 pelaku usaha	50,000,000	APBD

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	2 keg (Bintek dan sosialisasi LKPM dan OSS)	100,000,000	APBD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab Serang	150 Pelaku usaha	100,000,000	APBD
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab Serang	2 aplikasi, 1 aupdating sistem	400,000,000	APBD

	URUSAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 Dokumen	60,000,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Melebihi Pagu Validasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	2 Dokumen	15,000,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	2 Dokumen	15,000,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	DPMPTSP	1 Dokumen	20,000,000	APBD

					Realisasi Kinerja SKPD				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	1 Dokumen	70,000,000	APBD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DPMPPTSP	12 bulan	7,487,900,000	APBD
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPPTSP	1 dok	20,000,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPPTSP	2 Dokumen	15,000,000	APBD

				mesteran SKPD					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPPTSP	72 set	40,000,000	APBD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	12 bulan	25,000,000	APBD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	12 bulan	100,000,000	APBD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	12 bulan	100,000,000	APBD
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPPTSP	12 bulan	150,000,000	APBD

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	12 bulan	50,000,000	APBD
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	12 bulan	200,000,000	APBD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 bulan	500,000,000	APBD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 bulan	60,000,000	APBD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 bulan	450,000,000	APBD

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	12 bulan	865,000,000	APBD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPPTSP	27 unit	350,000,000	APBD
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPPTSP	3 Jenis	50,000,000	APBD
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DPMPPTSP	40 unit	150,000,000	APBD

				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	DPMPTSP	12 bulan	75,000,000	APBD
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	DPMPTSP	4 Jenis	60,000,000	APBD
				<b>JUMLAH</b>				<b>12,502,900,000</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2024 merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun satu tahun sebagai tolok ukur indikator kinerja untuk pencapaian target atau sasaran yang telah direncanakan melalui kebijakan dan program kerja yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Selanjutnya agar program-program yang tertuang didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka diharapkan adanya peran serta dari semua stakeholders, demikian pula dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi secara kontinyu, sehingga oleh semua pihak sehingga diperoleh umpan balik yang positif untuk pelaksanaan program-program tahun berikutnya.

Demikian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek bidang Penanaman Modal. Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang. Amin.

Serang, 12 Juli 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Serang

